

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang, sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara dan upaya agar menjadi negara maju, terutama dibidang pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, yang mana sistem pendidikanlah yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 “Pendidikan merupakan usaha sadar manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dari data survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 12 negara di Asia yang di survei. Dari hasil tersebut, menempatkan pendidikan di Indonesia masih dibawah dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Thailand (Kadir, 2012: 12). Hal ini menunjukkan kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatikan, tingkat pendidikan yang rendah makin berdampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, keikutsertaan pemerintah dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menjamin proses pendidikan sebaik-baiknya.

Dalam persaingan global di bidang usaha dan industri saat ini menuntut peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melalui pendidikan.

Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif SDM yang tangguh dalam menghadapi persaingan di era bebas ASEAN, maka kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara langsung turut merefleksikan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dalam hal ini SMK sebagai pendidikan kejuruan harus menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Usaha (DU/DI).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam setahun terakhir pengangguran bertambah 10 ribu orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,11 poin. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,42%. Hal ini juga dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bahwa penyebab dari tingginya angka pengangguran SMK adalah dimulai dari daya serap industri yang tidak seimbang dengan jumlah lulusan SMK, hingga guru tidak menguasai bidang ajarannya. Pihak DU/DI juga enggan menerima siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) karena menganggap merepotkan. Sedangkan sebaliknya pemagangan tersebut berguna sebagai proses belajar untuk persiapan memasuki dunia kerja. Sesuai dengan fakta di atas mengisyaratkan adanya permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK kita selama ini. Selain permasalahan terbatasnya lapangan pekerjaan akibat pertumbuhan ekonomi negara yang belum sesuai harapan, tingginya angka pengangguran tersebut mengisyaratkan adanya permasalahan *mis-match* antara *supply and demand*, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun relevansi bidang keahlian antara tenaga kerja yang diluluskan SMK dengan kebutuhan DU/DI.

Laporan Internasional dari *GIZ Germany* (2016) menekankan perlunya menyambungkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang terkait dengan pekerjaan di lapangan, sehingga lulusan memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk memiliki sejumlah keterampilan yang diperlukan untuk kerjasama (*employability skills*). Sebagaimana laporan UNESCO 1995 bahwa negara-negara berkembang maupun negara-negara maju berorientasi agar tamatan pendidikan kejuruan memiliki kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja untuk menghadapi tantangan-tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada era globalisasi (Slamet, 2004: 18). Selain berguna untuk meningkatkan daya saing, kompetensi juga sangat membantu upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Jadi apabila masyarakat memiliki kompetensi maka mereka akan terserap ke DU/DI.

Untuk mengembangkan kemampuan siswa SMK, harus dibangun kesadaran dan komitmen mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah dan DU/DI. Dan jika berharap pada pemerintah pusat, tentu lambat karena pemerintah belum mampu sepenuhnya menyediakan fasilitas dan biaya yang memadai bagi SMK seperti pada tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan sehingga dipastikan mengurangi kualitas lulusan sekolah kejuruan.

SMK merupakan suatu lembaga tingkat satuan pendidikan yang berperan menciptakan SDM yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan bidangnya.

SMK juga merupakan salah satu lembaga pendidikan formal di bawah Direktorat Pembinaan SMK (DitpSMK) yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja dengan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Selain itu, lulusan SMK juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi). Dan diharapkan juga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai wirausaha mandiri. Namun dalam Canavan, 2005; Hodge, 2011; Miller, 1985, apabila lulusan dari pendidikan kejuruan tidak dapat memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang telah ditetapkan lapangan pekerjaan, maka pendidikan kejuruan dianggap gagal.

Untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan, relevansi terhadap kurikulum yang digunakan merupakan hal yang penting. Kurikulum pendidikan kejuruan harus dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja. Kurikulum pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia kerja harus memiliki prinsip *go hand in hand* (Miller, 1985; Oloruntegbe, 2010), dalam Widiaty, (2013: 8). Dengan adanya relevansi kurikulum, maka SMK mampu menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja serta menghasilkan kualifikasi tenaga kerja yang lebih profesional dengan bekal pengalaman dan pelatihan dari DU/DI.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia maka pada 9 September 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia. Inpres tersebut ditujukan kepada sejumlah menteri, kepala badan dan para gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan

masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Revitalisasi pendidikan di SMK terutama menyangkut perubahan filosofi dari *supply-driven* ke arah *demand-driven*. Dalam hal ini, pendidikan kejuruan diarahkan pada penerapan sistem ganda (*dual-system*), yakni belajar teori di SMK dan praktik di industri. Oleh karena itu, desain kurikulum, proses pembelajaran dan sistem pengujiannya juga harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Sementara itu, revitalisasi pendidikan di SMK secara operasional diwujudkan dalam perubahan dan perbaikan pada berbagai aspek pendidikan, yaitu: (1) perubahan paradigma pendidikan kejuruan, (2) peningkatan mutu pembelajaran, dengan menerapkan pembelajaran abad XXI, Pergeseran Pembelajaran dari Kompetensi ke Kapabilitas, (3) peningkatan kerjasama dengan DU/DI, (4) penanaman jiwa kewirausahaan, (5) adaptasi dan kontekstualisasi lokal, (6) pelibatan dan pemanfaatan DU/DI sebagai: tempat praktik kerja (PKL), tempat magang kerja dan tempat belajar manajemen dunia kerja, (7) penyelarasan kurikulum SMK sesuai dengan model *dual system* yang diterapkan, baik dalam penetapan kegiatan praktik kerja maupun pembelajaran melalui *teaching factory*, dan (8) sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK.

Dengan adanya program penyelarasan dari *supply side* dan *demand side*, kualitas lulusan SMK dapat ditingkatkan. Penyelarasan dari *supply side* merupakan upaya penyesuaian lulusan yang dihasilkan oleh dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang dipresentasikan melalui tingkat penyerapan tenaga kerja, sedangkan penyelarasan dari *demand side* direpresentasikan melalui tingkat

pemenuhan permintaan dunia kerja (Tim Penyelaras dengan Dunia Kerja, 2010: 15). Langkah operasional yang dilakukan SMK dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya dan sesuai dengan kebutuhan DU/DI diantaranya dengan mengimplementasikan beberapa program kegiatan antara lain: peningkatan mutu pembelajaran, pembelajaran *teaching factory*, Program Kerja Lapangan (PKL) yang sampai saat ini diklaim sebagai implementasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG), kemitraan dengan DU/DI, magang kerja, penyelarasan kurikulum SMK, dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK.

Sesuai fakta, bahwa dalam implementasinya adalah dalam bentuk program PKL, atau yang dikenal dengan Prakerin. SMK sebagai lembaga yang bertujuan mempersiapkan lulusannya menjadi tenaga kerja yang profesional mengadakan PKL. PKL merupakan pembelajaran dengan *learning by doing* demi memberikan pengalaman bekerja langsung di dunia kerja pada siswa. Dalam dinamikanya, disebagain SMK kegiatan PKL ini terkesan hanya asal jalan dan jauh dari kriteria minimal sebagai implementasi konsep Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Sesuai konsepnya PSG merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan program pelatihan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja, untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Sebagai konsekuensinya, pencapaian keahlian siswa SMK sebagaimana diidealkan oleh PSG, masih perlu dipertanyakan. Diberbagai daerah di Indonesia yang menghasilkan lulusan SMK, salah satunya adalah Kota Yogyakarta yang memiliki 30 SMK baik negeri maupun swasta. Tentunya berbagai masalah yang kompleks timbul oleh karena dalam satu wilayah kota memiliki 30 SMK yang harus

menjalankan PSG dalam program PKL secara bersamaan. Maka untuk menanggulangi masalah tersebut ditempuh dengan cara menjalin kerjasama dengan DU/DI. Berkerja sama dengan DU/DI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan SMK, juga dapat mendukung tercapainya orientasi pendidikan kejuruan di SMK. Salah satu tujuan PKL atau Prakerin adalah untuk memberikan pengalaman serta mempraktikkan ilmu dan keterampilan yang sudah diperoleh di sekolah dengan kondisi nyata di dunia kerja (Priyatama, 2013: 157).

Menurut Djojonegoro (1998: 34), orientasi pendidikan kejuruan membawa konsekuensi bahwa pendidikan kejuruan harus selalu dekat dengan dunia kerja. Dalam artian bahwa perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, mulai dari kurikulum hingga penyaluran lulusan. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kejuruan adalah bekerja sama dengan DU/DI selaku penyedia lapangan kerja. Melalui kerjasama tersebut, dapat diperoleh *output* dan *outcome* yang optimal yaitu terciptanya SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.

DU/DI sebagai mitra kerjasama dengan SMK, diharapkan selain berperan sebagai tempat PKL siswa, dapat juga melaksanakan kerjasama lain. Kerjasama antara sekolah dengan DU/DI dapat berupa penyaluran lulusan, sarana dan prasarana, relevansi kurikulum seperti yang sudah dijelaskan di atas, serta kerjasama lain yang tentunya dapat menguntungkan pihak DU/DI dan dapat mengembangkan SMK. Menurut Charles Prosser yang dikutip oleh Wardiman (1998: 22), ada 16 prinsip pendidikan kejuruan dan diantaranya yang terkait dengan

peran industri ada (3) tiga prinsip. Pendidikan kejuruan akan efektif jika (1) tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja, (2) melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri, dan (3) pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih, merupakan replika lingkungan dimana nantinya ia akan bekerja.

Dengan adanya program kerjasama antara SMK dengan DU/DI, diharapkan dapat membawa dampak yang baik bagi siswa maupun bagi DU/DI. DU/DI ikut membantu peran sekolah dalam menciptakan tenaga kerja yang profesional, siap bersaing di dunia kerja dan sesuai dengan permintaan dunia kerja. Oleh karenanya peran DU/DI dalam pelaksanaan PKL di Kota Yogyakarta tersebut, sudah seharusnya dievaluasi pelaksanaannya. Berdasarkan kondisi di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap peran DU/DI dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan PKL di SMK untuk menilai sejauhmana peran DU/DI dalam pelaksanaan PKL tersebut, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Indonesia. Dengan mengambil sampel di 2 (dua) SMK Negeri di Kota Yogyakarta yaitu SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMK Negeri 3 Yogyakarta yang dikhususkan pada Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti yang termasuk dalam rumpun Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa di Kota Yogyakarta.



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Peran pemerintah untuk menyelenggarakan proses pendidikan harus ditingkatkan agar berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi negara.
2. Kualitas SDM belum memiliki kompetensi yang diperlukan DU/DI. Dalam pelaksanaan pendidikan kejuruan perlu menyelenggarakan PSG sesuai dengan kebutuhan DU/DI.
3. Fasilitas di SMK belum mengacu sesuai Standar Nasional Pendidikan. Dalam pelaksanaan pemerintah diharuskan mampu sepenuhnya menyediakan fasilitas dan biaya yang memadai dengan kesadaran dan komitmen.
4. Belum termaksimalkan implementasi program PKL. Dalam pelaksanaan PKL sebaiknya diselenggarakan sungguh-sungguh, sehingga lulusan SMK dapat terjun langsung dengan DU/DI.
5. Belum berperannya DU/DI pada program PKL, maka program PSG dan PKL sebaiknya dijalankan secara bersamaan agar lulusan SMK dapat menjadi lulusan yang profesional sesuai dengan tingkat keahlian.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, mengingat permasalahan yang muncul dalam PKL sangat luas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar peneliti fokus dalam menggali dan

menjabarkan hal yang berhubungan dengan peran DU/DI dalam pelaksanaan PKL di SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini akan mencari tahu sejauh mana peran DU/DI dalam pembimbingan PKL dan penilaian PKL dengan menggunakan metode deskriptif evaluatif. Metode ini digunakan karena sesuai dengan judul yang diteliti yaitu menguraikan data mengenai persepsi siswa tentang peran DU/DI.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Seberapa peran DU/DI dalam pelaksanaan PKL di SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti di Kota Yogyakarta?”

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 2 (dua) hal penting terkait dengan peran DU/DI dalam pelaksanaan PKL di SMK Program Keahlian Teknologi Konstruksi dan Properti di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran DU/DI dalam pembimbingan pelaksanaan PKL.
2. Mendeskripsikan peran DU/DI dalam penilaian pelaksanaan PKL.

## **F. Manfaat Penelitian**

Setelah mengetahui tujuan penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini menambah pengetahuan mengenai peran DU/DI dalam pelaksanaan PKL yang lebih komprehensif yang dapat dijadikan dasar rekomendasi peningkatan mutu implementasi PKL di SMK pada masa yang akan datang khususnya di Kota Yogyakarta.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai wahana dalam menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menjalani studi, serta menambah pengalaman, wawasan keilmuan dan wahana untuk melatih keterampilan menulis karya ilmiah dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

#### **b. Bagi Kepala Sekolah**

Kepala sekolah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan evaluasi dalam pelaksanaan PKL dengan peran DU/DI, sehingga menjadi masukan dalam proses pembimbingan maupun penilaian untuk semakin meningkatkan keberhasilan PKL.

#### **c. Bagi Sekolah**

Hasil dari penelitian ini memberikan referensi sejauh mana selama ini peran DU/DI dalam upayanya melaksanakan PKL sebagai implementasi dari PSG terutama untuk SMK yang ada di Kota Yogyakarta. Apabila memang ketika sudah

dilakukan penelitian hasilnya adalah baik, hal ini tentu saja akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan dapat dijadikan contoh bagi sekolah lainnya